

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (2004).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (2008).

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (2012).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, (2019).

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1005 Tahun 2006 tentang Penetapan Pusat Investasi Pemerintah pada Departemen Keuangan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (2006).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, (2017).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, (2018).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, (2020).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah, (2020).

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 25/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro Oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, (2018).

Perdirut PIP No.5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Relaksasi Bagi Penerima Pembiayaan Ultra Mikro Terdampak Pandemi Covid-19, (2020).

Buku atau Sumber Lain

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Ekonomi Indonesia Triwulan I 2020 Tumbuh 2,97 Persen*.
- Bahtiar, R. A. (2021). Dampak pandemi covid-19 terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah serta solusinya. *Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. (2018). *Semangat UMi Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi* (Majalah Tr).
- Hamim, E., Elmas, M. S. H., & Priantono, S. (2021). Implementasi Produk Mikro Kreasi bagi Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Era Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis*, 1, 166–175.
- Hia, V. D. P., Handaka, R. D., & Zega, Y. T. (2021). Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 75–84.
- Johns Hopkins University. (2021, December 8). *Statistics and Research Coronavirus Pandemic (COVID-19) – the data*.
- KPPN Sragen. (2020a). *LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENYALURAN PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (UMi) Semester I Tahun 2020*.
- KPPN Sragen. (2020b). *LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENYALURAN PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (UMi) Semester II Tahun 2020*.
- KPPN Sragen. (2021a). *LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENYALURAN PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (UMi) Semester I Tahun 2021*.
- KPPN Sragen. (2021b). *LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENYALURAN PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (UMi) Semester II Tahun 2021*.
- Muttaqin, A. A., & Hartono, A. R. (2019). Implementasi Penerapan Pembiayaan Ultra Mikro di BMT-UGT Sidogiri. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 273–299.
- Ni Nyoman Sunariani, AAN. Oka Suryadinatha, & Ida IDM Rai Mahaputra. (2017). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui

Program Binaan Di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2, 2–3.

Pusat Investasi Pemerintah. (2020). *Berkarya di Tengah Pandemi (Annual Report 2020)*.

Rahman, M. E. (n.d.). *Kinerja Koperasi Dan Umkm Penerima Pinjaman Kredit Ultra Mikro*.

Ratnaningtyas, E. M. (2020). Dampak dan Strategi UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Menghadapi The “New Normal.” *EBBANK*, 11(1), 63–70.

Rini, A., & Arivina, R. (2021). Modal Sosial Sebagai Upaya Keberlangsungan Usaha Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Debitur Ultra Mikro (Umi) Pt. Pegadaian (Persero) Area Lampung). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(08), 664–673.

Slamet Riyadi. (2020, June 22). *Daftar Insentif untuk UMKM di Masa dan Usulan Pasca Pandemi*. Artikel Dan Opini.

Surnida, D. (2020). Pembiayaan Ultra Mikro Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 95/PMK. 05/2018 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 119/DSN-MUI/II/2018. *MUAMALATUNA*, 12(1), 100–123.